



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang - Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas,BadanPendapatanKabupaten Berau telah menyusun bahan LPPD Kabupaten Berau Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan urusan pelaksana pemerintahan Kabupaten Berau yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan daerah, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, 14 Januari 2020

Kepala Badan

Hi. SRI EKA TAKARIYATI, SH,MM

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 19651212 199403 2 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	1
B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	1
C. Nama Perangkat Daerah	1
D. Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan	1
E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	2
F. Daftar Urut Kepangkatan Perangkat Daerah	6
BAB. II URUSANKONKUREN	
A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana.....	17
B. Program dan Kegiatan	17
C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	19
D. Alokasi dan Realisasi Anggaran	21
E. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	24
F. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	25
G. Permasalahan dan Solusi	27
BAB. III TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
A. Kerjasama Antar Daerah.....	17
B. KerjasamaDaerah dengan Pihak Ketiga.....	17
C. KoordinasiDenganInstansiVertikal di Daerah.....	19

BAB. IV AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Program dan Kegiatan	29
B. Alokasi dan Realisasi Anggaran	30
C. Permasalahan dan Solusi	31

BAB. V PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROPINSI

A. Internasional dan Nasional.....	37
B. Propinsi.....	37

BAB. VI PENUTUP

A. Kesimpulan	38
B. Saran	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah mengacupada :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7).

B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

C. Nama Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda adalah unsure pelaksana pemerintahan Kabupaten Berau yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau ditunjang dengan unsur-unsur Organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
- c. Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- d. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah;
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

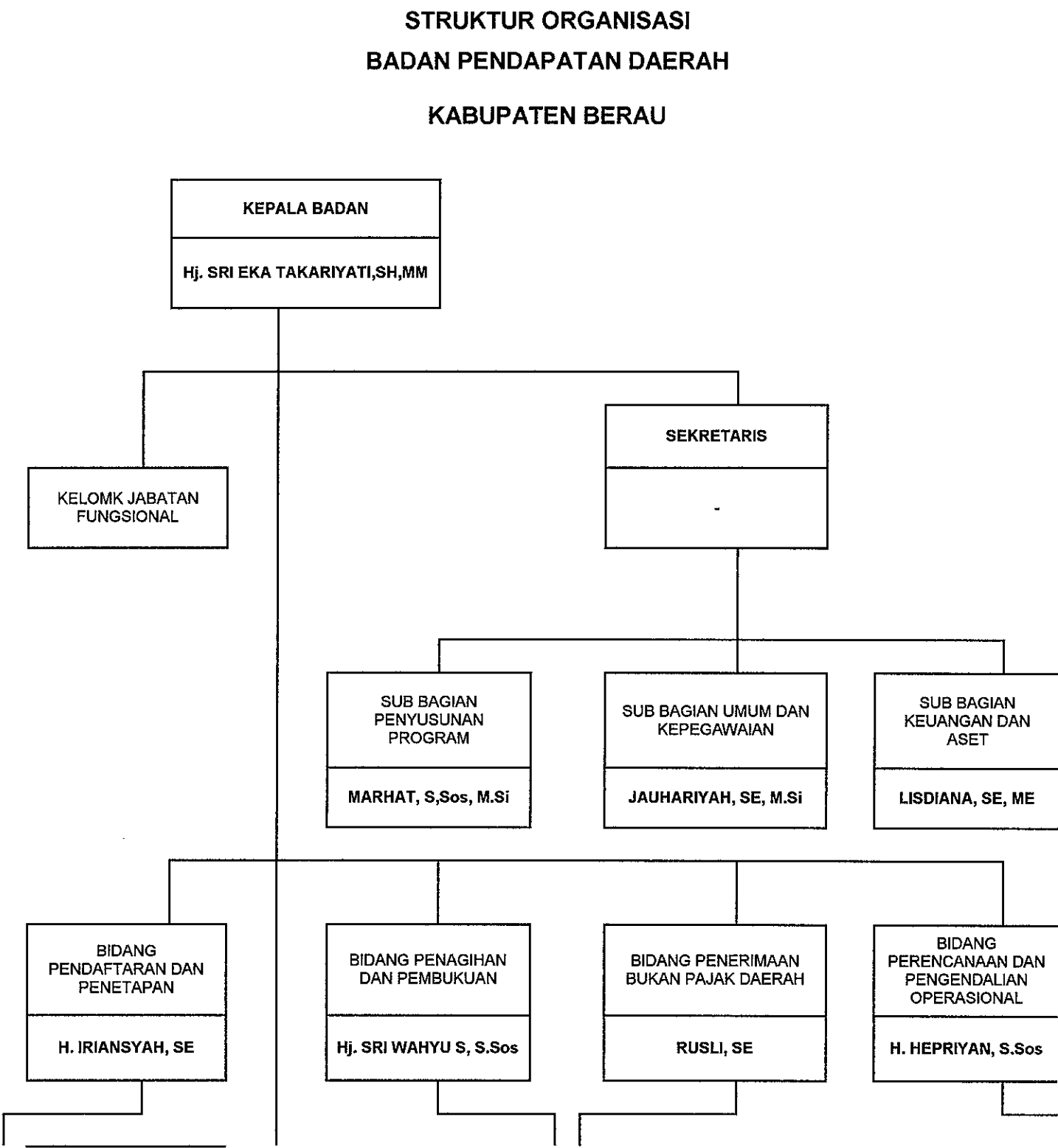
D. Bidang Urusan Wajib Pemerintahan Yang Dilaksanakan

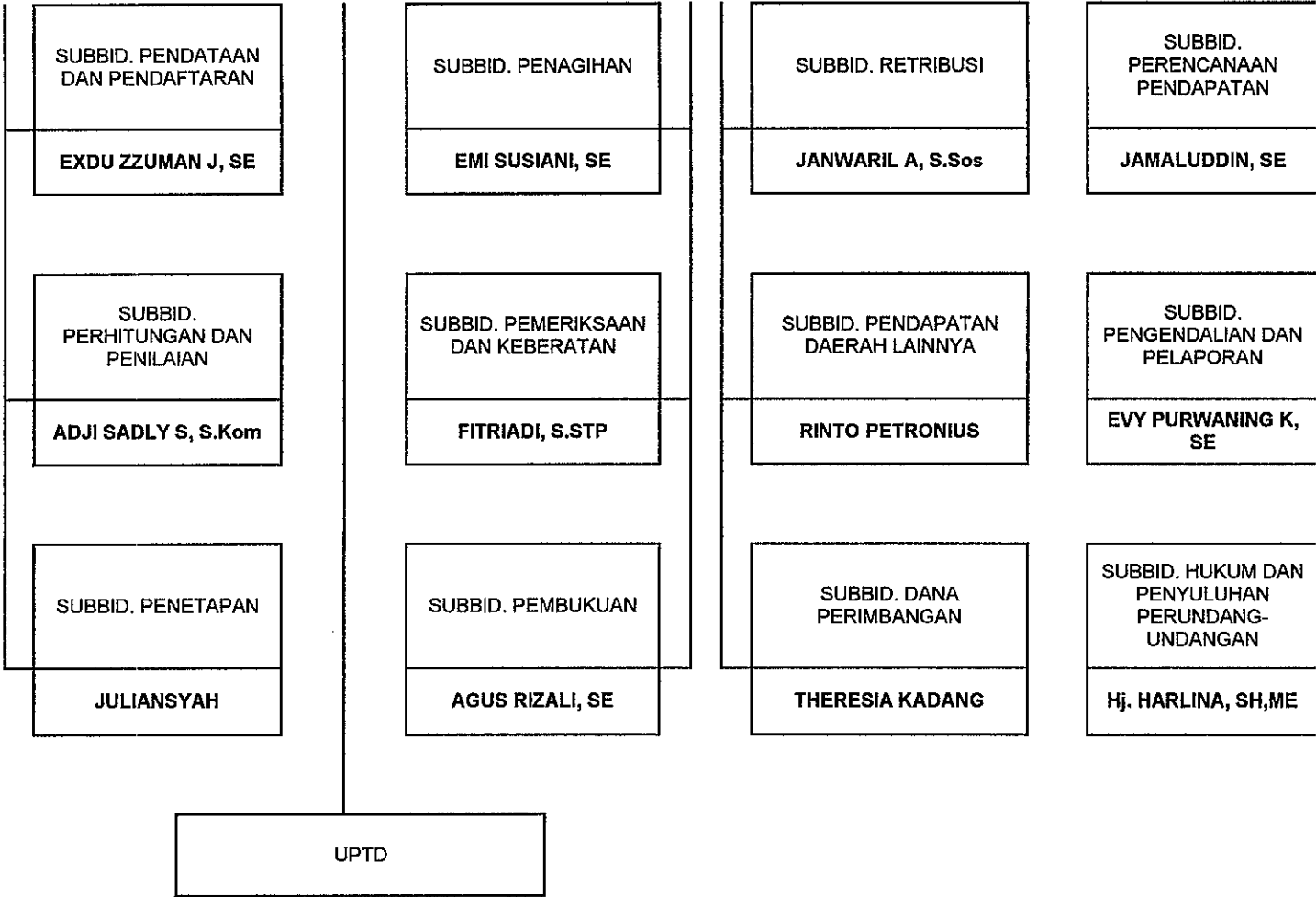
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsure pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

E. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dapat diliha struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau





F. Daftar Urut Kepangkatan Perangkat Daerah

BadanPendapatan Kabupaten Berau memiliki sumberdaya manusia berjumlah 45 orang, sesuai daftar urut kepangkatan sebagai berikut dalam Tabel 2 :

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIT ORGANISASI : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN				MASA KERJA		PENDIDIKAN			AGAMA
		GOL/RUANG	TMT GOL	ESELON	NAMA JAB	TMT JAB	TAHUN	BULAN		TAHUN	NAMA	LLS	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hj.Sri Eka Takariyati, SH.,MM TanjungRedeb 08 Juni 1968	19651212 199403 2 008	IV/c	1-Apr-18	II.b	KepalaBadan	11-Oct-19	30	00	Prajabatan ADUM ADUMLA Diklat PIM III Diklat PIM II	1993 1997 1999 2007 2016	PascaSarjana	2002	Islam
H. Hepriyan, S.Sos TanjungRedeb 07 Juli 1970	19700707 199703 1 003	IV/a	1-Oct-09	III.b	Kabid. Perencanaa Dan Pengendalian Operasional	1-Jan-17	21	5	Prajabatan ADUM ADUMLA Diklat PIM III	1994 2000 2000 2009	Sarjana	1994	Islam
Hj. Sri WahyuSuprihadin, S.Sos 22 Juni 1971	19710622 199803 2 004	IV/a	1-Oct-15	III.b	Kabid. Pendaftaran danPenetapan	1-Jan-17	20	05	Prajabatan Adum Diklat PIM III	1998 2002 2011	Sarjana	2014	Islam
Hj.Harlina,SH, ME Tonyamang	19681231 199803 2 022	IV/a	01-Oct-19	IV.a	Kasubbid. Hukumdan Penyuluhan	11-Jan-17	21	10	Prajabatan ADUM	1998 2002	Sarjana	1992	Islam

vyPurwaniqKusumastuti, SE Magelang 07 Agustus 1979	19790807 199803 2 002	III/d	1-Apr-16	IV,a	Kasubbid. Pengendalian Pelaporan	11-Jan-17	16	3	Prajabatan Diklat PIM IV	1998 2016	Sarjana	2003	Islam
Lisdiana,SE, ME GunungTabur 31 Juli 1977	19770731 199803 2 001	III/d	1-Oct-17	IV,a	Kasubbag, Keuangan danAset	11-Jan-17	19	1	Prajabatan Diklat PIM IV	1998 2016	Sarjana Pascasarjana	2003 2018	Islam
Juliansyah TanjungRedeb 12 Februari 1963	19630212 198909 1 002	III/d	1-Oct-17	IV,a	Kasubbid. Penetapan	11-Jan-17	24	10	Prajabatan ADUM	1989 2000	SMAN	1984	Islam
AgusRijali, SE Samarinda 25 Mei 1975	19750523 200212 1 005	III/d	1-Apr-18	IV,a	Kasubbid. Pembukuan	11-Jan-17	19	2	Prajabatan Diklat PIM IV	2003 2015	Sarjana	2005	Islam
Adji Sadiy Saputera, S.Kom GunungTabur 08 Maret 1972	19720308 200604 1 015	III/d	1-Apr-18	IV,a	Kasubbid. Perhitungan danPenilaian	11-Jan-17	16	5	Prajabatan Diklat PIM IV	2007 2016	Sarjana	1997	Islam
ExduZzuman J, SE Sanburakat 14 April 1975	19750414 200701 1 023	III/d	1-Apr-19	IV,a	Kasibbid. Pendataan danPendaftran	11-Jan-17	16	8	Prajabatan DiklatUrusiKarpajak Diklat PIM IV	2008 2008	Sarjana	1999	Islam
Rinto Petronius Batikpapan 09 September 1968	19680909 199002 1 002	III/c	1-Apr-16	IV,a	Kasubbid. Pendapatan Daerah Lainnya	11-Jan-17	24	5	Prajabatan ADUM KursusBendaharawan	1990 2000 1997	SMEA	1989	Islam

Jauhariyah, SE, M.Si TanjungRedeb 10 September 1970	19700910199303 2 006	III/c	1-Apr-16	IV.a	Kasubbag Umun&Kepegawian	11-Jan-17	23	10	Prajabatan Diklat PIM IV	2007 2016	PascaSarjana	2013	Islam
RatnaRaia Toding, SE Pangleon 15 Agustus 1980	19800815 200904 2 007	III/c	1-Apr-17	VerifikatorKeuangan		1-Apr-17	10	3	Prajabatan	2010	Sarjana	2004	Protestan
LeniSupriani,SE TanjungRedeb 27 Juni 1982	19820627 200212 2 001	III/c	1-Oct-19	Bendahara		1-Oct-15	13	7	Prajabatan	2001	Sarjana PascaSarjana	2009 2018	Islam
Hj.YaniRokhmiaiti Berau 28 Januari 1963	19630128 199403 2 002	III/b	1-Apr-13	AdministrasiKeuangan		1-Apr-13	28	1	Prajabatan	1995	SMEA	1983	Islam
Sukeni TelukBayur 01 Januari 1971	19710101 199303 2 017	III/b	1-Apr-13	JuruPungutRetribusi		1-Apr-13	21	4	Prajabatan	1994	SMA	1990	Islam
Hj.NurAliyah Berau 11 November 1963	19631111 198601 2 007	III/b	1-Apr-16	PengelolaGaji		1-Apr-16	26	3	Prajabatan	1985	SLTA	1995	Islam
NurulSa'dah, SE TanjungRedeb 26 Februari 1980	19800226 200701 2 006	III/b	1-Apr-16	BendaharaPenerima		1-Apr-16	14	7	Prajabatan	2008	Sarjana	2010	Islam
TedyHaryadi, SE, ME	19790814 200502 1 006	III/b	1-Apr-17	AnalisisRencana Program		1-Apr-17	12	5	Prajabatan	2005	Sarjana	2015	Islam

Berau 14 Agustus 1979										PascaSarjana	2018	
SamsulEdeson,SE Berau 24 Desember 1972	19721224 200701 1 010	III/b	1-Oct-17	danKegiatan PengelolaBarangMilik Negara	1-Oct-12	12	8	Prajabatan	2008	Sarjana	2006	Islam
Abdul Hadi, SE Berau 09 Desember 1983	19831209 201001 1 020	III/a	1-Oct-14	AnalisisPerencanaan, Evaluasi danPelaporan	1-Oct-14	10	2	Prajabatan	2011	Sarjana	2012	Islam
Sulasmi Amir, S,STP Luwu Utara 28 Oktober 1994	19941028 201609 2 001	III/a	1-Oct-17	PengadministrasiHukum	1-Oct-17	2	9	Prajabatan	2016	Sarjana	2016	Islam
Roni Sander Saranga, SE Balikpapan 04 Desember 1980	19801204 201101 1 005	III/a	1-Apr-18	PenusunKebutuhanBarangInventaris	1-Apr-15	7	10	Prajabatan	2012	Sarjana	2014	Protestan
EndangPartiningsih TelukBayur 11 Oktober 1978	19781011 200212 2 005	III/a	1-Apr-19	Operator Mesin	1-Apr-19	20	3	Prajabatan	2003	SMA	1997	Islam
M. Dody Asmara TanjungRedeb 17 Juni 1980	19800617 200701 1 008	II/d	1-Apr-19	Pengolah Data dan InformasiPenilaian	1-Apr-15	17	0	Prajabatan	2008	SMEA	1999	Islam
Eddy Susanto TanjungRedeb 14 Oktober 1981	19811014 200701 1 004	II/d	1-Apr-19	Pengelola Data Adminis trasi danVerifikasi	1-Apr-15	17	3	Prajabatan	2008	STM	1999	Islam
AlwinSidarta Ujung Pandang 17 Desember 1974	19741217 200701 1 020	II/d	1-Apr-19	AnalisisPendapatan Daerah	1-Apr-15	14	7	Prajabatan	2008	SMA	1994	Islam

Abdul Muis Tarakan 02 Februari 1970	19700202 200801 1 017	II/c	1-Apr-16	SekretarisPimpinan	1-Apr-16	15	10	Prajabatan	2009	SMA	1992	Islam
Syahroni Effendi Berau 11 Januari 1982	19820111 200901 1 003	II/c	01-Apr-17		01-Apr-17	15	10	Prajabatan	2010	D1	2012	Islam
IrwanZuhdi Berau 30 Mei 1977	19770530 200901 1 002	II/c	01-Oct-17		01-Oct-17	15	0	Prajabatan	2010	D1	2012	Islam
Sukarno SeiBebanir 15 Juli 1978	19780715 200901 1 000	II/c	01-Oct-17		01-Oct-17	14	7	Prajabatan	2010	D1	2012	Islam
Asbiansyah Sungai Meriam 11 Agustus 1970	19700811 201001 1 003	II/c	01-Apr-18		01-Apr-14	15	7	Prajabatan	2011	SMA	1998	Islam
Irma Wiraniah TanjungRedeb 14 Agustus 1974	19740814 201001 2 005	II/c	01-Apr-18	PengelolaPendaftaran danPendataanPajak danRetribusi	01-Apr-14	14	11	Prajabatan	2011	SMA	1993	Islam
JaroTriaji, SE BatuAmpar 20 April 1979	19790420 201001 1 018	II/c	01-Apr-18	AnalisisPenagihanPajak	01-Apr-14	14	11	Prajabatan	2011	SARJANA	2016	Islam
AdiSetiawan TanjungRedeb 28 Oktober 1985	19851028 201001 1 014	II/c	01-Apr-18	PengadministrasiUmum	2-Jul-18	14	11	Prajabatan	2011	SMA	2003	Islam

Herliansyah Beratu 20 Agustus 1982	19820820 201001 1 032	I/c	01-Apr-18		Operator Mesin	01-Apr-14	15	8	Prajabatan	2013	SMP	2008	Islam
--	-----------------------	-----	-----------	--	----------------	-----------	----	---	------------	------	-----	------	-------

BAB II
URUSAN KONKUREN

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Pendapatan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Rincian tugas pokok dan fungsi lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau, dimana merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Kabupaten Berau Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat yang dijabarkan dalam 6 (enam) Program dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Kabupaten Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Anggaran

No	Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.113.900.000,00
	a)	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00

3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		200.000.000,00
	a)	Bimtek Implementasi perundang-undangan	200.000.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		77.500.000,00
	a)	Sosialisasi Kinerja program SKPD	60.000.000,00
	b)	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	17.500.000,00
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		3.117.100.000,00
	a)	Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	470.000.000,00
	b)	Penagihan pajak daerah	513.000.000,00
	c)	Pembinaan dan pengawasan wajib pajak dan retribusi daerah	499.100.000,00
	d)	Optimalisasi penerimaan dana pendapatan transfer	200.000.000,00
	e)	Penyusunan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah	110.000.000,00
	f)	Pendataan dan Pemuktahiran data WP daerah	1.010.000.000,00
	g)	Optimalisasi Retribusi Daerah	180.000.000,00
	h)	Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah	135.000.000,00
6	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		815.000.000,00
	a)	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	815.000.000,00
Jumlah			7.478.500.000,00

	b)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	395.600.000,00
	c)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	245.000.000,00
	d)	Penyediaan jasa administrasi keuangan	190.581.000,00
	e)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	142.840.000,00
	f)	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.000.000,00
	g)	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00
	h)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450.000.000,00
	i)	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11.799.000,00
	j)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350.000.000,00
	k)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00
	l)	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000,00
	m)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000,00
	n)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000,00
	o)	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	96.080.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		155.000.000,00
	a)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000,00
	b)	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler	5.000.000,00

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pendapatan Kabupaten Berau yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Berau yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 44 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, terdiri dari SLTP sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 15 orang DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) sebanyak 1 orang, STRATA 1 sebanyak 20 orang, STRATA 2 sebanyak 7 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Bapenda Kabupaten Berau
Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTP	1
2	SLTA	15
3	DIPLOMA II/III (D-2 / D-3)	1
4	STRATA 1	20
5	STRATA 2	7
6	STRATA 3	0
	JUMLAH	44

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Pendapatan Kabupaten Berau.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai Bapenda
Kabupaten Berau
Tahun 2019

NO	Pangkat / Golongan	JUMLAH
1	Juru Muda/IA	
2	Juru Muda TK. I/IB	
3	Juru/IC	1
4	Juru TK. I/ID	
5	Pengatur Muda/IIA	
6	Pengatur Muda TK. I/IIB	
7	Pengatur/IIIC	8
8	Pengatur TK. I/IID	3
9	Penata Muda/IIIA	2
10	Penata Muda TK. I/IIIB	7
11	Penata /IIIC	4
12	Penata TK. I/IIID	13
13	Pembina /IVA	5
14	Pembina TK I/IVB	
15	Pembina Utama Muda/IVC	1
16	Pembina Utama Madya/IVD	
17	Pembina Utama/IVE	
	JUMLAH	44

Sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, tercatat 59,09% pegawai Bapenda adalah golongan III, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 1 dan SLTA. Pegawai yang berpendidikan Strata 1 pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan pada BadanPendapatanKabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Daftar Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Bapenda
Kabupaten Berau Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	20

2	Pejabat Fungsional	0
	JUMLAH	20

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.478.500.000,00 yang terbagi dalam 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan.

Secara keseluruhanrealisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 86,16% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 6.443.710.799,00 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.478.500.000,00.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan berserta capaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. **3.113.900.000,00** dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 2.798.959.777,00 dengan persentase 89,89%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal Bapenda.Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal Bapenda.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 150.000.000,00 terealisasi Rp. 137.827.500,00.-atau 91,89 %.

- b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeler dengan anggaran Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 100 %

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 154.327.142,00 atau 77,16 %

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Sosialisasi Kinerja program SKPD tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 60.000.000,00 terealisasi Rp. 56.915.000,00.-atau 98,19 %.
- b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan capaian kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 17.500.000,00 terealisasi Rp. 16.308.300,00 atau 93,19 %.

5) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. sebesar Rp. 3.117.100,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 2.715.697.813,00 atau 87,12%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah

- a. Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegiatan Penggalan Potensi Pajak Daerah tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 470.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 420.819.456,00 atau 89,54 %. Dari Anggaran tersebut capaian target kinerja 2,226 WP/WR, dapat terealisasi sebanyak 2.450 WP/WR atau 110,06 %.

- b. Penagihan Daerah

Kegiatan Penagihan Daerah tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 513.000,00terrealisasi Rp. 436.734.190,00atau 85,13 %.Target kinerja kegiatan ini sebesar 38,90 Milyar, dan dapat terealisasi 75 Milyar atau 192,8 %.

- c. Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 499.100.000,00terrealisasi Rp. 393.824.650,00atau 78,91 %. target kinerja 30 WP/WR, terealisasi 50 WP/WR atau 166,67 %, .
- d. Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer
Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer tahun 2019 dengan anggaran Rp 200.000.000,00 realisasi Rp. 191.198.895,00atau 95,60 %. adapun target kinerja sebesar 1,40 Terliun , dapatterrealisasi 2,017 Terliun atau 144,07 %.
- e. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah
Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah tahun 2019 dengan anggaran Rp 110.000.000,00 realisasi Rp. 108.419.523,00 atau 98,56% dan target kinerja 5 raperda/raperbup , realisasi 11 raperda/raperbup atau 220 %.
- f. Pendataan dan Pemutakhiran Data WP Daerah
Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data WP Daerah tahun 2019 dengan anggaran Rp 1.010.000.000,00 realisasi Rp. 870.455.635,00atau 86,18 % dan target kinerja 13 Kecamatan, realisasi 13 Kecamatan atau 100 %.

- g. Optimalisasi Retribusi Daerah
Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data WP Daerah tahun 2019 dengan anggaran Rp 180.000.000,00 realisasi Rp. 163.083.989,00 atau 90,60 % dan target kinerja 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen atau 100 %.
- h. Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah
Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data WP Daerah tahun 2019 dengan anggaran Rp 135.000.000,00 realisasi Rp. 131.161.475,00 atau 97,16 % dan target kinerja 2 Dokumen , realisasi 2 Dokumen atau 100 %.

6) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- a. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019 dengan anggaran Rp 815.000.000,00 realisasi Rp. 556.675.267,00 atau 68,30 % dan target kinerja 3 sistem, realisasi 3 sistem atau 100 %.

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan (DPPA Tahun Anggaran 2019) yang dilaksanakan dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sudah sesuai dengan program kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

NO	PROGRAM RKPD	PROGRAM DPPA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Disamping sumber daya manusia yang profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, disamping sumber daya manusia yang profesional. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau saat ini belum memiliki gedung sendiri yang cukup *representatif* untuk pelaksanaan tugas, demikian halnya juga dengan sarana dan prasarana kantor. Pada saat ini, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau berlokasi di Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6.Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	6		
2	Kendaraan Roda 2	30		
3	Gedung Kantor	-		
4	Kursi	125		
5	Meja	91		
6	Komputer PC	56		
7	Printer	33		
8	Note Book / Laptop	10		
9	Air Conditioner	18		
10	Papan Struktur Organisasi	1		
11	Papan Pengumuman	1		
12	UPS	4		
13	Lemari Arsip	15		
14	Brankas	1		
15	Mesin Ketik Manual	1		
16	Wireless	2		
17	Mesin Foto Kopi	1		
18	Televisi	6		
19	Dispenser	6		
20	Infocus/Proyektor	3		
21	Kamera	1		

22	Mesin Scanner	2		
23	Drone	1		
24	Organ / Electone	1		

7. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan realisasi keuangan tidak sesuai target dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tetapi secara garis besar dapat disampaikan bahwa permasalahan secara mendasar yang terjadi pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang kurang matang dalam menganggarkan program kegiatan
- b. Proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang lama
- c. Terkendala dengan peralihan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan pertimbangan untuk lebih cermat dan telitinya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan..
- d. Sarana gedung masih belum refresentatif.

2. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Kabupaten Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Agar Mempercepat proses pengadaan program /kegiatan dapat selesai sesuai dengan jadwal..
- b. Mengoptimalkan fungsi Tim Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran supaya daya serap anggaran meningkat
- c. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran per triwulan
- d. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Bapenda perlu adanya sarana Gedung yang refresentatif.

BAB III

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tidak ada melaksanakan Kerja Sama atau Memorial Of Understanding (MOU) antar daerah.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

- a) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Berau (Badan Pendapatan Daerah) dengan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA KANTOR CABANG TANJUNG REDEB TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH Dengan nomor : 970/208.a/BAPENDA-E/2019 dan nomor 0953/SPK/BPD-TJR/III/2019.
- b) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Berau (Badan Pendapatan Daerah) dengan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA KANTOR CABANG TANJUNG REDEB TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH Dengan nomor : 970/688/BAPENDA-E/2019 dan nomor 3438/PRJ/BPD-TJR/III/2019

- c) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau (Badan Pendapatan Daerah) dengan Kejaksaan Negeri Berau.Nomor pihak pertama : 59.2/03-PRJJ/BKPDT/2017 dan nomor pihak kedua : B-809/Q.4.14/Gs/05/2017.

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau melakukan kegiatan Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal antara lain dengan :

- BPN
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb

Dengan adanya koordinasi Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi Vertikal dapat :

- Tercapainya penerimaan Pajak Negara dan Pendapatan asli daerah (PAD) yang optimal.
- Tercapainya peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak di wilayah Kabupaten Berau
- Meningkatkan professional aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV

a. Target Kinerja Bapenda

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 ditetapka dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Berikut adalah Perjanjian Kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indicator kinerja utama,beserta target kinerja dan anggaran.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pendapatan daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Prosentase Penerimaan DBH Pajak dan SDA Prosentase Penerimaan dan lain-lain pendapatan yang sah	242.728 M 1.368 T 304,487 M
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan pendapatan berbasis IT	2 Sistem
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai dengan kebutuhan yang professional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Apprasial, IT,Operator Consul, Teller,	15 Orang

		Account Representative)	
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dan Pengembangan	46 Orang
4	Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan dan kelayakan	32 Unit

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja. Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018 dengan realisasinya. Dari 3 jenis sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

- Sumbangan Pihak Ketiga
- Pendapatan Hibah

Adapun sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah Tercapainya Penerimaan daerah secara optimal, maka dalam Tahun Anggaran 2019 Badan Pendapatan Daerah telah mengkoordinasikan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan Target sebesar Rp. 201.957.373.976,63 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 205.022.620.451,87 atau 101, 52%.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran ini diukur melalui Indikator sebagaimana ditunjukkan dalam table berikut :

Tabel Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2019

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	215.211.192.729,00	231.313.492.052,88.	107,48%
Dana Perimbangan	1.852.931.880.897,76	2.017.537.589.443,00	108,88%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	111.418.157.279,00	121.549.010.715,39	109,09%

Data yang sama pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2018

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	201.957.373.976,63	205.022.620.451,87	101,52%
Dana Perimbangan	1.499.529.839.825,50	1.682.458.853.256,00	112,20%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	429.459.108.000,00	394.032.096.500,00	91,75%

Dari 11 (sebelas) jenis pajak yang ditargetkan sebesar Rp 65.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 74.856.934.788,45 (115,16%). Jenis-jenis pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pencapaian 11 (Sebelas) Jenis Pajak Tahun Anggaran 2019

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hotel	7.000.000.000,00	5.477.285.336,00	78,25%
Pajak Restoran	25.000.000.000,00	33.660.540.777,00	134,64%
Pajak Hiburan	500.000.000,00	329.876.114,00	65,98%
Pajak Reklame	350.000.000,00	464.407.462,00	132,69%
Pajak Penerangan Jalan	19.000.000.000,00	19.576.512.996,00	112,35%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	588.000.000,00	63.209.295,00	11,13%
Pajak Parkir	7.000.000,00	210.576.000,00	3008,23 %
Pajak Air Tanah	75.000.000,00	11.512.968,00	15,35%
Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	869.901.825,00	57,99%
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	4.000.000.000,00	4.755.215.325,00	118,88%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000,00	7.667.961.397,45	109,54%

Dari 16 (enam belas) jenis retribusi yang ditargetkan sebesar 12.315.490.450,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 10.919.146.668,76 (88,66%). Pencapaian dari beberapa jenis retribusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Pencapaian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	2.194.040.500,00	146,27%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	670.000.000,00	853.026.000,00	127,32%

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	658.500.000,00	208.454.000,00	31,66%
Retribusi Pelayanan Pasar	2.607.112.700,00	1.611.101.225,00	61,80%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	292.080.000,00	338.535.000,00	115,90%
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	4.054.783.750,00	3.607.091.050,00	88,96%
Retribusi Pelayanan Penyediaan Penyedotan Kakus	15.000.000,00	6.400.000,00	42,67%
Retribusi Tempat Pelelangan	36.240.000,00	0,00	0,00%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.500.000,00	1.008.000,00	18,33%
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	229.000.000,00	238.089.500,00	103,97%
Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan	342.534.000,00	264.343.970,00	77,17%
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000,00	132.035.000,00	82,52%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	1.336.616.123,76	89,11%
Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	0	0	0%
Retribusi Izin Trayek	24.000.000,00	5.400.000,00	22,50%
Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	220.740.000,00	123.006.300,00	55,72%

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari :

Tabel 3.5. Pencapaian Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2019

Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari	259.626.000,00	276.934.479,00	106,37%

PLTU (PT. Indo Pusaka Berau)	2.500.000.000,00	0	0%
Bankaltim (Deviden)	21.534.817.000,00	21.537.817.410,28	100%
PDAM Tirta Segah	2.183.102.000,00	2.176.647.991,00	99,70%

Dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

Tabel 3.6. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Tahun Anggaran 2019

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	633.836.475,70	63,38%
Penerimaan Jasa Giro	5.845.612.000,00	8.837.467.019,35	151,18%
Penerimaan Bunga Deposito	33.193.199.000,00	28.546.158.660,61	86,00%
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.000.000,00	198.143.196,20	566,12%
Pendapatan Denda	535.000.000,00	767.362.974,01	142,49%
Penerimaan BLUD	64.637.000.000,00	74.848.478.392,01	115,80%
Penerimaan Lain-lain	312.040.000,00	1.800.897.668,81	577,13%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.860.306.279,00	5.801.969.91100	99,0%

Dari penerimaan Dana Perimbangan :

Tabel 3.7. Pencapaian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak dan	1.038.555.338.897,76	1.225.153.328.072,00	117,97%

Bagi Hasil Bukan Pajak			
Dana Alokasi Umum	596.930.629,00	596.930.629,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus	217.445.913.000,00	195.453.632.317	89,89%

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pencapaian Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2019

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	571.349.588.036,60	551.351.813.659,46	96,50%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10.652.016.000	10.652.016.000,00	100,00%
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	234.959.000.000,00	234.959.000.000,00	100,00%
Dana Desa dan Desa Adat	109.901.417.000,00	108.830.771.000,00	99,03%

Adapun hasil pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk tahun 2019 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	2.226 WP/WR	2.450 WP/WR	110,04
	65 M	74,85 M	115,16

	30 WP/WR	50 WP/WR	166,67
	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100
	5 raperda/ raperbup	11 raperda/ raperbup	220
Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	1.038,76 T	1.225,00 T	117,97
Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	2 Sistem	2 Sistem	100
Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang	15 Orang	100
Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	46 Orang	46 Orang	100
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit	32 Unit	100

Perbandingan dengan Pencapaian Target Indikator di Tahun 2018
sebagai berikut :

Tabel Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	2.226 WP/WR	3.015 WP/WR	135,44
	38,90 M	64,16 M	164,94

	30 WP/WR	50 WP/WR	166,67
	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100
	5 raperda/ raperbup	6 raperda/ raperbup	120
Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	717,28 M	935,30 M	130,40
Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	2 Sistem	2 Sistem	100
Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang	15 Orang	100
Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	46 Orang	46 Orang	100
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit	32 Unit	100

3.1. Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Komposisi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran 2019

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	1.139.000,00	56,95
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	395.600.000,00	325.033.770,00	82,16
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	245.000.000,00	216.533.916,00	88,38
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	190.581.000,00	180.464.000,00	94,69
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	142.840.000,00	119.348.400,00	83,55
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.000.000,00	21.510.174,00	71,70
	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	196.355.625,00	98,18
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450.000.000,00	447.314.000,00	99,40
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11.799.000,00	11.790.000,00	99,92
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350.000.000,00	324.516.000,00	92,72
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	30.000.000,00	13.374.000,00	44,58

	perundang-undangan			
	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000,00	229.248.000,00	91,70
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000,00	499.154.152,00	99,83,
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000,00	148.700.000,00	67,59
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	96.080.000,00	64.478.740,00	67,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000	137.827.500,00	91,89
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi perundang-undangan	200.000.000,00	154.327.142,00	77,16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sosialisasi Kinerja program SKPD	60.000.000,00	58.915.000,00	98,19
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	17.500.000,00	16.308.300,00	93,19

	SKPD			
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	470.000.000,00	420.819.456,00	89,54
	Penagihan pajak daerah	513.000.000,00	436.734.190,00	85,13
	Pembinaan dan pengawasan wajib pajak dan retribusi daerah	499.100.000,00	393.824.650,00	78,91
	Optimalisasi penerimaan dana pendapatan transfer	200.000.000,00	191.198.895,00	95,60
	Penyusunan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah	110.000.000,00	108.419.523,00	98,56
	Pendataan dan Pemuktahiran data WP daerah	1.010.000.000,00	870.455.635,00	86,18
	Optimalisasi Retribusi Daerah	180.000.000,00	163.083.989,00	90,60
	Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah	135.000.000,00	131.161.475,00	97,16
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	815.000.000,00	556.675.267,00	68,30

Pada Tahun sebelumnya TARGET kinerja BAPENDA juga masih ada yang belum dapat seluruhnya memenuhi keinginan target yang ingin dicapai.Tetapi banyak hal juga yang telah dapat memenuhi target

Capaian Kinerja.Seperti Peningkatan PAD setiap Tahun bertambah, akan tetapi masih belum dapat memenuhi / menaikkan nilai dari Penilaian LPPD dikarenakan besarnya pembanding yang diberikan.Oleh sebab itu OPD Badan Pendapatan Daerah harus bisa meningkatkan PAD lebih tinggi lagi agar dapat mencapai Nilai Maximal, agar tidak bergantung lagi pada Dana Bagi Hasil, Dana Perimbangan serta dana Transfer.Agar Daerah dapat membangun dan membiayai sendiri Pembangunan dan Seluruh Kegiatan di Kabupaten.Berikut adalah beberapa perbandingan target capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2018

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	201.957.373.976,63	205.022.620.451,87	101,52%
Dana Perimbangan	1.499.529.893.825,50	1.682.458.853.256,00	112,20%
Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	429.459.108.000,00	394.032.096.500,00	91,75%

Data yang sama pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2017

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	250.791.459.650,00	224.455.683.689,17	89,50%
Dana Perimbangan	1.267.424.645.998,00	1.186.720.354.749,00	93,63%
Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	427.379.637,00	438.295.931.000,00	102,55%

Tabel 3.3. Pencapaian 11 (Sebelas) Jenis Pajak Tahun Anggaran 2018

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hotel	5.000.000.000,00	5.636.835.204,00	112,74%
Pajak Restoran	19.031.129.000,00	24.421.960.673,00	128,33%
Pajak Hiburan	300.000.000,00	396.374.941,00	132,12%
Pajak Reklame	282.000.000,00	306.976.481,00	108,86%
Pajak Penerangan Jalan	17.136.000.000,00	18.382.988.948,00	107,28%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	89.131.500,00	8,91%
Pajak Parkir	7.000.000,00	0,00	0 %
Pajak Air Tanah	75.000.000,00	43.348.644,00	57,80%
Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	790.116.000,00	52,67%
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	3.500.000.000,00	2.694.945.636,00	77,00%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000.000,00	11.274.765.036,00	150,33%

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran 2018

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.399.500,00	93,30
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	392.600.000,00	340.142.838,00	86,64
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	255.000.000,00	198.940.400,00	78,02

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	171.656.000,00	169.064.000,00	98,49
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	141.400.000,00	141.396.000,00	100,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	35.000.000,00	23.904.290,00	68,30
	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	181.357.000,00	90,68
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450.000.000,00	387.614.455,00	86,14
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	9.952.750,00	99,53
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	96.000.000,00	92.400.000,00	96,25
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.800.000,00	5.905.000,00	22,89
	Penyediaan makanan dan minuman	200.000.000,00	174.956.200,00	87,48
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	162.000.000,00	158.248.000,00	97,68
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	64.900.000,00	64.900.000,00	100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	127.000.000	114.928.250,00	90,49
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi perundang-undangan	66.800.000,00	62.244.500,00	93,18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sosialisasi Kinerja program SKPD	28.015.000,00	28.000.000,00	99,95
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	5.000.000,00	4.940.000,00	98,80
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	468.298.000,00	434.015.523,00	92,68
	Penagihan pajak daerah	523.300.000,00	485.496.000,00	92,78
	Pembinaan dan pengawasan wajib pajak dan retribusi daerah	431.129.000,00	298.598.340,00	69,26
	Optimalisasi penerimaan dana pendapatan	220.000.000,00	176.838.666,00	80,38

	transfer			
	Penyusunan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah	131.460.000,00	118.761.563,00	90,34
	Pendataan dan Pemuktahiran data WP daerah	803.327.000,00	559.307.147,00	69,62
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	882.000.000,00	810.423.368,00	91,88

Adapun hasil pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.9. Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	2.226 WP/WR	3.015 WP/WR	135,44
	38,90 M	64,16 M	164,94
	30 WP/WR	50 WP/WR	166,67
	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100
	5 raperda/	6 raperda/ raperbup	120

	raperbup		
Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	717,28 M	935,30 M	130,40
Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	2 Sistem	2 Sistem	100
Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang	15 Orang	100
Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	46 Orang	46 Orang	100
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit	32 Unit	100

- a. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah pada Tahun 2019;

Tabel Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2019

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	215.211.192.729,00	231.313.492.052,88.	107,48%
Dana Perimbangan	1.852.931.880.897,76	2.017.537.589.443,00	108,88%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	111.418.157.279,00	121.549.010.715,39	109,09%
Jumlah Sistem Pengelolaan PAD Berbasis IT	3 System	3 System	100%

Target Capaian pada Renstra RPJMD Pada Tahun 2019 Sebagai Berikut :

Indikator Sasaran	Target RENSTRA (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	38.900.000.000,00	231.313.492.052,88.	Lebih target
Dana Perimbangan	1.499.529.839.825,50	2.017.537.589.443,00	Belum mencapai target
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	726.725.821.036,60	670.834.600.659,46	Belum Mencapai Target
Jumlah Sistem Pengelolaan PAD Berbasis IT	3 System	3 System	100%

Jadi Capaian Kinerja berbanding dengan capaian target Pembangunan Jangka menengah adalah Adanya beberapa aspek yang tidak dapat dicapai sesuai target yang diemban dikarenakan mungkin ada sesuatu hal teknis yang tidk dapat dilaksanakan.sehingganya setelah maximal menjalankan tugas,terdapat kendala yang dihadapi.Itu membuat beberapa Target yang ingin dicapai tidak sesuai.tabel diatas adalah bagian dari beberapa item yang telah memenuhi target yang ingin dicapai..

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai;dan Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Analisis efisiensi Penggunaan Sumber daya terkait dengan kinerja yang telah dicapai dapat dilihat dari Hasil Capaian Target serta realisasi yang dihasilkan yang antara lain :

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Relisasi
Pendapatan Asli Daerah	215.211.192.729,00	231.313.492.052,88.

Dana Perimbangan	1.852.931.880.897,76	2.017.537.589.443,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	111.418.157.279,00	121.549.010.715,39

Bahwa hasil capaian melebihi target dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Berau.

Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran 2019

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	1.139.000,00	56,95
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	395.600.000,00	325.033.770,00	82,16
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	245.000.000,00	216.533.916,00	88,38
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	190.581.000,00	180.464.000,00	94,69
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	142.840.000,00	119.348.400,00	83,55
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.000.000,00	21.510.174,00	71,70
	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	196.355.625,00	98,18
	Penyediaan barang cetakan dan	450.000.000,00	447.314.000,00	99,40

	penggandaan			
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11.799.000,00	11.790.000,00	99,92
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350.000.000,00	324.516.000,00	92,72
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	13.374.000,00	44,58
	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000,00	229.248.000,00	91,70
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000,00	499.154.152,00	99,83,
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000,00	148.700.000,00	67,59
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	96.080.000,00	64.478.740,00	67,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000	137.827.500,00	91,89
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi perundang-undangan	200.000.000,00	154.327.142,00	77,16

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sosialisasi Kinerja program SKPD	60.000.000,00	58.915.000,00	98,19
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	17.500.000,00	16.308.300,00	93,19
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	470.000.000,00	420.819.456,00	89,54
	Penagihan pajak daerah	513.000.000,00	436.734.190,00	85,13
	Pembinaan dan pengawasan wajib pajak dan retribusi daerah	499.100.000,00	393.824.650,00	78,91
	Optimalisasi penerimaan dana pendapatan transfer	200.000.000,00	191.198.895,00	95,60
	Penyusunan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah	110.000.000,00	108.419.523,00	98,56
	Pendataan dan Pemuktahiran data WP daerah	1.010.000.000,00	870.455.635,00	86,18
	Optimalisasi Retribusi Daerah	180.000.000,00	163.083.989,00	90,60
	Penyusunan Rencana	135.000.000,00	131.161.475,00	97,16

	Pendapatan Daerah			
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	815.000.000,00	556.675.267,00	68,30

Analisis mengenai Program dan kegiatan, bahwa Banyak masih Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. karena capaian kinerja OPD totalnya hanya mencapai 90 % pada seluruhnya. Perlu adanya Oleh karenanya perlu adanya Koordinasi dan serapan anggaran yang cepat pada awal Tahun Anggaran, perencanaan yang betul-betul matang sebelum melaksanakan dan menganggarkan semua kegiatan/program pada Kantor Bapenda agar lebih efektif dan efisien untuk menyelenggarakan APBD. Karena semua OPD harus bersusah payah untuk mendapatkan Anggaran untuk melaksankana Program dan kegiatan ditempat masing masing. tetapi bersyukur karena BAPENDA Kabupaten Berau dapat merealisasi Anggarannya diatas 50%.

BAB V

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROPINSI

A. Internasional dan Nasional

Pada tahun 2019 tidak ada Penghargaan tingkat Internasional dan Nasional yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

B. Provinsi

Pada Tahun 2019 tidak ada Penghargaan tingkat Provinsi yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Kabupaten Berau adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umum dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

B. SARAN

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2019, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Berau Tahun 2017 - 2021 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan

acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Kabupaten Berau ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan.